

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah telah melalui banyak perkembangan mulai dari penggunaan basis kas, pendekatan *single fund* dan pendekatan *single entry*. Di masa kini, Indonesia telah menerapkan akuntansi basis akrual dalam akuntansinya. Penggunaan basis akrual oleh Indonesia juga telah disesuaikan dengan International Public Sector Accounting Standard yang diacu banyak negara. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi pedoman penggunaan akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perkembangan yang signifikan juga terjadi pada laporan keuangan pemerintah yang harus menerapkan basis akrual. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi selaras dengan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan harus disusun sebagai bentuk penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Salah satu bagian yang wajib dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah ialah Aset Tetap. Aset tetap menjadi bagian utama aset pemerintah dan signifikan terutama dalam penyajian neraca. Akuntansi aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dan Buletin Teknis Nomor 15 yang mengatur terkait Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruwal. Menurut peraturan tersebut, aset tetap didefinisikan sebagai aset yang memiliki wujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan tujuan digunakan dan dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat luas. Yang termasuk aset tetap ialah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap termasuk bagian penting dalam penilaian opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) saat pemeriksaan aset tetap oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I tahun 2021, ditemukan bahwa pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap belum layak sehingga berpengaruh pada validitas dan keakuratan data. Hal tersebut mengakibatkan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutannya pada neraca tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pengendalian pada proses konsolidasi LKPP dan Laporan BMN, aplikasi SIMAK BMN dan E-Rekon & LK, serta pengendalian pada K/L dalam pengelolaan aset tetap dinilai belum layak.

Meskipun dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap belum layak, namun secara keseluruhan pengelolaan negara terus membaik di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, K/L yang memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (98%) sedangkan yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 2 K/L (2%). Capaian opini WTP sebesar 98% telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) dibandingkan dengan RPJMN 2020-2024 sebesar 91%. Kementerian Keuangan menjadi salah satu K/L yang tetap konsisten dalam mempertahankan opini WTP pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

Kementerian Keuangan memiliki 11 unit eselon I, yang salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). DJPb memiliki instansi vertikal di daerah yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Oleh karena itu, penulis akan meninjau salah satu instansi vertikal DJPb yakni KPPN dalam hal penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan SAP, mengingat capaian Kementerian Keuangan yang mendapat opini WTP pada tahun 2016-2020. Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis memilih KPPN Mojokerto yang dibawah oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pemaparan tentang Akuntansi Aset Tetap yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan akuntansi aset tetap terkait pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, pelepasan, penyajian dan pengungkapan aset tetap yang dikelola di KPPN Mojokerto. Hasil tinjauan tersebut akan dipaparkan dalam KTTA

ini dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik dalam penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto?
2. Bagaimana kesesuaian antara praktik penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik dalam penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto?
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara praktik penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam KTTA ini dibatasi pada tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto. Ruang lingkup pembahasan aset tetap mencakup pengertian, klasifikasi,

pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, pelepasan, penyajian dan pengungkapan pada aset tetap terhadap laporan keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto. Penulis akan meninjau kesesuaian antara peraturan terkait dengan data dan fakta di lapangan yang telah diperoleh dalam penyusunan karya tulis ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca terkait kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta peraturan terkait.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi bagi penulis maupun masyarakat dalam bidang kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto dengan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu dijadikan rujukan penelitian selanjutnya mengenai penerapan akuntansi aset tetap.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini dalam empat bab utama dan beberapa subbab dengan urutan dan pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pemilihan judul karya tulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang relevan dengan penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual. Teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk melakukan tinjauan yang akan dilakukan pada kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil atas tinjauan penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah pada bab pendahuluan dan memaparkan kembali simpulan pada bab metode dan pembahasan secara ringkas.